

IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI E-KINERJA PADA ASPEK FLEKSIBILITAS DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS

Anggi Widya Sari

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : anggiwidyasari@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi adanya permasalahan dalam penggunaan sistem aplikasi e-kinerja pada aspek fleksibilitas di Diskominfo Kabupaten Ciamis diantaranya aplikasi e-kinerja kurang menunjang terhadap jenjang karir pegawai, aplikasi sering mengalami keterlambatan dalam memproses data atau saat diakses, dan adanya kekhawatiran mengenai potensi kebocoran data kinerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aplikasi E-Kinerja diterapkan dalam hal fleksibilitas di Diskominfo Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dari sumber primer, yakni 6 informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling, serta data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sistem e-kinerja belum sepenuhnya beroperasi dengan baik. Beberapa dimensi dan indikator, seperti fleksibilitas, belum berfungsi secara optimal. Di Diskominfo Kabupaten Ciamis, aplikasi E-Kinerja dinilai kurang mendukung perkembangan karir pegawai. Selain itu, terdapat hambatan dalam beradaptasi dengan perubahan sistem aplikasi E-Kinerja, yang meliputi gangguan alur kerja akibat perubahan fitur, serta kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang memadai. Beberapa pengguna mengalami masalah ketika perubahan mempengaruhi fitur yang sering mereka gunakan, dan tidak semua perubahan disertai panduan atau pelatihan yang memadai. Untuk mengatasi hambatan ini, beberapa langkah dapat dilakukan, antara lain dengan menyediakan pelatihan yang lebih intensif dan panduan yang jelas sebelum memperkenalkan perubahan signifikan. Selain itu, implementasi strategi yang meminimalkan gangguan pada alur kerja selama perubahan berlangsung sangat penting, termasuk perencanaan waktu peluncuran yang lebih baik serta dukungan tambahan selama masa transisi. Memperkuat mekanisme umpan balik melalui survei atau diskusi langsung setelah perubahan diterapkan juga menjadi langkah krusial.

Kata Kunci : Implementasi, Aplikasi E-Kinerja, Fleksibilitas

PENDAHULUAN

Globalisasi adalah fenomena yang bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas di berbagai negara di seluruh dunia saat ini (Raihan et al., 2017:2). Kemajuan dalam teknologi, komunikasi, dan transportasi telah memungkinkan mobilitas orang, barang, dan informasi dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat, serta dapat menjangkau wilayah yang sangat luas tanpa hambatan. Selain itu, konvergensi teknologi di antara komputer, elektronik, telekomunikasi, dan penyiaran telah terjadi, seakan-akan menghapus batas-batas geografis nasional (Raihan et al., 2017:2).

Kemajuan teknologi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan secara signifikan, termasuk dalam ekonomi, politik, seni, budaya, dan pendidikan (Mukhsin, 2020:7). Pesatnya kemajuan teknologi digital telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah berkembang pesat, tidak hanya dalam industri dan perdagangan, tetapi juga telah meluas ke bidang-bidang lain seperti pertahanan, keamanan, pendidikan, sosial, dan ketenagakerjaan (Raihan et al., 2017:2).

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) menawarkan berbagai keuntungan dibandingkan dengan sistem manual dan tradisional. Akibatnya, hampir semua negara di dunia telah mengadopsi ICT untuk berbagai sistem di negara mereka, terutama dalam pengelolaan pemerintahan (Raihan et al., 2017:2). Pemerintahan merupakan sektor vital dalam suatu negara yang berperan dalam mengatur, memberikan

pelayanan, serta menangani berbagai aspek yang terkait dengan negara dan seluruh isinya (Setiyono, 2023:1). Dengan tantangan teknologi di era saat ini, pemerintah dituntut untuk mampu beradaptasi dan mengintegrasikan teknologi digital dalam berbagai aktivitas penyelenggaraan pemerintahan (Setiyono, 2023:1). Fenomena ini kemudian melahirkan istilah e-government atau aplikasi E-Kinerja. Aplikasi E-Kinerja adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung dan mempermudah satuan kerja pemerintah atau perangkat daerah dalam pencatatan dan pelaporan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Nurahma et al., 2022:2).

Di Indonesia, upaya menuju e-government telah dimulai sejak tahun 2001 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 mengenai Telematika (Telekomunikasi, Media, dan Informatika). Instruksi ini menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi telematika oleh aparat pemerintah untuk mendukung prinsip good governance dan mempercepat proses demokrasi (Surdin, 2016:179). Selanjutnya, diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government menunjukkan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui penerapan e-government (Lestari, 2018:76). Kebijakan ini diharapkan dapat memotivasi ASN untuk meningkatkan kinerjanya dan mengubah cara kerja mereka. Di samping itu, diharapkan ASN yang

sebelumnya kurang disiplin akan menjadi lebih disiplin dan memiliki daya saing yang lebih tinggi (Rahmatul Putra & Frinaldi, 2023:13).

Revolusi dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membuka peluang bagi pemerintah untuk mengembangkan inovasi dalam pengelolaan aparatur negara melalui penerapan Sistem Aplikasi E-Kinerja. Sistem ini memanfaatkan TIK untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan menyediakan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak terkait lainnya (Pangondian et al., 2019:93). Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Aplikasi E-Kinerja, tujuan dari peraturan ini adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan dapat dipercaya (Rahmadi et al., 2021:2). Sistem Aplikasi E-Kinerja memiliki visi untuk menciptakan sistem yang terpadu dan komprehensif guna mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi Sistem Aplikasi E-Kinerja meliputi: (1) Menata dan memperkuat organisasi serta tata kelola sistem; (2) Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas; (3) Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan handal; (4) Meningkatkan kompetensi dan inovasi sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Diskominfo Kabupaten Ciamis bertindak sebagai pelaksana dalam urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, serta statistik. Dalam implementasi Sistem Aplikasi E-Kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika berfungsi sebagai pendorong teknologi informasi. Tugasnya mencakup penyediaan infrastruktur, pengaturan data dan informasi, serta pengelolaan sistem informasi dan keamanan siber yang akan diterapkan dalam Aplikasi E-Kinerja.

Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor 83 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Aplikasi E-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah, diharapkan bahwa sistem ini dapat meningkatkan kolaborasi antara instansi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas serta menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan, seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme, melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan berbasis elektronik.

Meskipun sistem pengawasan dan pengaduan berbasis elektronik telah diterapkan, masih ada tantangan terkait aksesibilitas dan literasi digital di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke internet atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menggunakan platform elektronik dengan efektif. Diskominfo Kabupaten Ciamis mungkin belum

cukup aktif dalam mempromosikan dan memberikan pelatihan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenai penggunaan sistem pengawasan dan pengaduan elektronik. Akibatnya, kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang keberadaan dan manfaat sistem tersebut menjadi rendah. Aparatur Sipil Negara (ASN) mungkin masih merasa ragu untuk menggunakan sistem pengaduan elektronik karena kekhawatiran akan keamanan data, privasi, dan keefektifan dari tindak lanjut terhadap kinerja mereka.

Diskominfo Kabupaten Ciamis mungkin belum sepenuhnya mengimplementasikan sistem pengaduan elektronik dan belum menerapkan sanksi yang cukup tegas. Selain itu, capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Rencana Strategis Perubahan Tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa masih ada beberapa indikator yang belum mencapai hasil yang optimal.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, pelaksanaan Implementasi Sistem Aplikasi E-Kinerja di Diskominfo Kabupaten Ciamis masih belum optimal. Beberapa masalah yang teridentifikasi meliputi: (1) Kemudahan penggunaan sistem aplikasi E-Kinerja di Diskominfo Kabupaten Ciamis masih menjadi permasalahan utama. Meskipun aplikasi dirancang untuk mempermudah proses penilaian kinerja, banyak pegawai mengalami kesulitan karena antarmuka pengguna yang tidak intuitif dan kurangnya panduan penggunaan yang memadai. Akibatnya, pegawai membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami dan

menggunakan aplikasi secara efektif, yang berdampak pada produktivitas dan kepuasan kerja. (2). Kecepatan akses aplikasi juga menjadi masalah yang penting, karena beberapa pegawai melaporkan bahwa aplikasi sering mengalami keterlambatan dalam memproses data atau saat diakses, terutama selama jam-jam sibuk. Latensi tinggi menghambat proses evaluasi kinerja secara tepat waktu dan mengganggu alur kerja yang efisien. Keterlambatan ini mempengaruhi ketepatan dan akurasi penilaian kinerja. (3). Aspek keamanan aplikasi e-kinerja juga menjadi perhatian, yaitu banyak pegawai dan pengelola aplikasi merasa bahwa tingkat keamanan yang diterapkan masih rendah. Kekhawatiran mengenai potensi kebocoran data kinerja yang sensitif atau pelanggaran privasi muncul, mengingat aplikasi menyimpan informasi penting mengenai kinerja pegawai. Ketiadaan fitur keamanan yang memadai, seperti otentikasi ganda atau enkripsi data, membuat aplikasi rentan terhadap akses tidak sah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana implementasi sistem aplikasi E-Kinerja pada aspek fleksibilitas di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis?

ASPEK FLEKSIBILITAS DALAM IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI E-KINERJA

Aspek fleksibilitas dalam penerapan sistem aplikasi e-kinerja mencakup kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan berbagai kebutuhan

pengguna dan dinamika lingkungan kerja. Ini meliputi beberapa elemen penting, seperti kemampuan untuk menyesuaikan antarmuka pengguna agar sesuai dengan preferensi dan kebutuhan spesifik setiap individu atau kelompok. Selain itu, sistem harus mendukung berbagai jenis metrik kinerja yang relevan untuk berbagai peran dan departemen dalam organisasi, memungkinkan evaluasi yang komprehensif dan sesuai dengan konteks masing-masing. Fleksibilitas juga mencakup integrasi dengan sistem lain yang mungkin digunakan dalam organisasi, seperti sistem manajemen sumber daya manusia atau perangkat lunak keuangan, untuk memastikan aliran data yang lancar dan mengurangi duplikasi usaha. Dengan fleksibilitas ini, sistem dapat tetap relevan dan efektif dalam mendukung tujuan organisasi meskipun terjadi perubahan dalam kebutuhan atau lingkungan kerja.

Menurut gusty terdapat dua indikator untuk mengukur keberhasilan suatu implementasi sistem aplikasi E-kinerja dalam aspek Fleksibilitas, diantaranya

1. Adaptasi perubahan sistem aplikasi e-kinerja
Menurut Jim Highsmith (2019:85) bahwa adaptasi perubahan berarti sistem harus dirancang untuk mendukung pengembangan adaptif yang memungkinkan respon cepat terhadap perubahan yang dinamis dan tidak terduga. Hal ini melibatkan penggunaan metodologi yang fleksibel dan berorientasi pada kolaborasi untuk mengelola perubahan

dalam aplikasi dengan cara yang iteratif dan incremental.

2. Pemenuhan kebutuhan pengguna sistem aplikasi e-kinerja
Menurut Karl Wiegerts (2019:178) bahwa pemenuhan kebutuhan pengguna berarti merinci dan memahami kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari pengguna akhir dan memastikan bahwa sistem aplikasi e-kinerja dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini termasuk analisis kebutuhan yang mendalam, dokumentasi yang jelas, dan verifikasi bahwa fitur yang dikembangkan sesuai dengan ekspektasi pengguna.

Dari berbagai pendapat yang ada, fleksibilitas dapat diartikan sebagai kemampuan sistem informasi untuk menyesuaikan diri dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Fleksibilitas mencerminkan kemampuan sistem untuk mencapai tujuan melalui berbagai cara dan menyesuaikan diri dengan keinginan pengguna.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Adapun karakteristik dari penelitian fenomenologi meliputi : deskripsi, reduksi, esensi dan intensionalitas (Moustakas, 1994:7). Permasalahan deskriptif merupakan bentuk permasalahan yang menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena atau situasi. Penelitian yang menggambarkan suatu fenomena atau situasi disebut sebagai penelitian fenomenologi (Syahrizal & Jailani, 2023:22).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yang diperoleh secara langsung dari subjek, termasuk informan yang memahami inti permasalahan atau objek penelitian. Selain itu, data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama, melainkan dari pihak lain, seperti penelaahan buku, jurnal, atau artikel yang relevan. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup studi kepustakaan dan studi lapangan, yang meliputi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus kajian penelitian ini adalah pada implementasi sistem aplikasi E-Kinerja, khususnya dalam aspek fleksibilitas di Diskominfo Kabupaten Ciamis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penerapan sistem aplikasi E-Kinerja pada aspek fleksibilitas di Diskominfo Kabupaten Ciamis, akan dibahas berbagai indikator yang telah ditetapkan. Setiap indikator berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana Kabupaten Ciamis melaksanakan tugasnya dalam mengimplementasikan sistem e-Kinerja.

1. Adaptasi perubahan sistem aplikasi e-kinerja di Diskominfo Kabupaten Ciamis

Hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan observasi menunjukkan bahwa adaptasi terhadap perubahan sistem aplikasi E-Kinerja di Diskominfo Kabupaten Ciamis berjalan relatif baik. Namun, beberapa area perlu perhatian, seperti pelatihan dan

panduan yang lebih efektif, manajemen gangguan alur kerja akibat perubahan, mekanisme umpan balik yang lebih baik, serta peningkatan sosialisasi dan koordinasi antara pengelola aplikasi dan pengguna. Perbaikan di bidang-bidang ini penting untuk memastikan sistem e-kinerja dapat berfungsi secara optimal dan mendukung kebutuhan organisasi dengan lebih baik.

Hambatan dalam adaptasi terhadap perubahan sistem aplikasi e-kinerja di Diskominfo Kabupaten Ciamis termasuk gangguan alur kerja yang disebabkan oleh perubahan fitur dan kekurangan dalam sosialisasi serta pelatihan. Beberapa pengguna mengalami masalah ketika perubahan mempengaruhi fitur yang sering mereka gunakan, dan tidak semua perubahan disertai panduan atau pelatihan yang memadai.

Untuk mengatasi hambatan ini, beberapa upaya perlu dilakukan. Pertama, pelatihan yang lebih intensif dan panduan yang jelas perlu disediakan sebelum memperkenalkan perubahan signifikan. Ini termasuk memberikan contoh konkret dan langkah-langkah yang mudah dipahami agar pengguna dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan.

Selain itu, penting untuk mengimplementasikan strategi yang meminimalkan gangguan alur kerja saat perubahan dilakukan, termasuk perencanaan yang lebih baik terkait waktu peluncuran perubahan dan menyediakan dukungan tambahan selama masa transisi.

Terakhir, memperkuat mekanisme umpan balik dengan survei atau diskusi langsung setelah perubahan diberlakukan sangat penting.

Menyediakan alur komunikasi terbuka untuk menangani masalah atau pertanyaan terkait perubahan serta memastikan koordinasi yang efektif antara pengelola aplikasi dan pengguna juga akan membantu dalam proses adaptasi.

Teori yang sejalan dengan hasil penelitian menurut Jim Highsmith (2019:85) bahwa adaptasi perubahan berarti sistem harus dirancang untuk mendukung pengembangan adaptif yang memungkinkan respon cepat terhadap perubahan yang dinamis dan tidak terduga. Hal ini melibatkan penggunaan metodologi yang fleksibel dan berorientasi pada kolaborasi untuk mengelola perubahan dalam aplikasi dengan cara yang iteratif dan incremental.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa program E-Kinerja di Diskominfo Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya fleksibel dalam penggunaannya. Diperlukan perbaikan dan peningkatan pada program E-Kinerja agar dapat lebih efektif mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Fleksibilitas program E-Kinerja sangat penting karena akan mempengaruhi kinerja pegawai dalam penerapan program tersebut dalam pekerjaan sehari-hari di Diskominfo Kabupaten Ciamis.

2. Pemenuhan kebutuhan pengguna sistem aplikasi e-kinerja di Diskominfo Kabupaten Ciamis

Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan observasi menunjukkan bahwa beberapa sistem telah disesuaikan dengan teknologi

yang tersedia di Pemerintah Kabupaten Ciamis, terutama di Diskominfo Kabupaten Ciamis. Penyesuaian ini bertujuan agar program E-Kinerja dapat digunakan secara efektif dan efisien di lingkungan Diskominfo Kabupaten Ciamis. Namun, terdapat beberapa kekurangan, seperti sarana dan prasarana teknologi yang belum memadai. Selain itu, program E-Kinerja belum sepenuhnya dapat diakses melalui semua jenis smartphone, dan fitur serta menu yang tersedia belum optimal. Kondisi ini menjadi kendala bagi pegawai dalam penerapan program E-Kinerja. Meskipun kompetensi pegawai yang baik sangat penting, efektivitasnya belum maksimal tanpa dukungan teknologi yang memadai sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Selain itu, tingkat kesesuaian E-Kinerja dengan peraturan yang berlaku saat ini masih belum sepenuhnya terealisasi dengan baik.

Hal ini terbukti dengan masih banyaknya kendala yang dihadapi oleh Diskominfo Kabupaten Ciamis, terutama yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk E-Kinerja. Seharusnya, dengan adanya Peraturan Bupati, semua instansi terkait harus mampu memenuhi berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk E-Kinerja. Selain itu, E-Kinerja juga belum sepenuhnya dapat menyesuaikan diri dengan kondisi pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga program ini mengalami dampak yang cukup signifikan akibat kebijakan tersebut.

Teori yang mendukung hasil penelitian menurut Karl Wieggers (2019:178) bahwa pemenuhan kebutuhan pengguna berarti merinci

dan memahami kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari pengguna akhir dan memastikan bahwa sistem aplikasi e-kinerja dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini termasuk analisis kebutuhan yang mendalam, dokumentasi yang jelas, dan verifikasi bahwa fitur yang dikembangkan sesuai dengan ekspektasi pengguna.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diuraikan bahwa secara keseluruhan, meskipun sistem aplikasi E-Kinerja di Diskominfo Kabupaten Ciamis sudah memberikan banyak bantuan, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan. Hal ini mencakup aksesibilitas informasi, efisiensi fitur tertentu, integrasi dengan sistem lain, dan pengembangan lebih lanjut untuk mendukung manajemen talenta. Perbaikan di area tersebut dapat lebih meningkatkan pemenuhan kebutuhan pengguna dan efektivitas sistem secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi sistem aplikasi E-Kinerja pada aspek fleksibilitas di Diskominfo Kabupaten Ciamis, dapat disimpulkan bahwa sistem E-Kinerja saat ini kurang mendukung pengembangan jenjang karir kinerja pegawai. Adapun hambatan dalam adaptasi terhadap perubahan sistem aplikasi e-kinerja di Diskominfo Kabupaten Ciamis termasuk gangguan alur kerja yang disebabkan oleh perubahan fitur dan kekurangan dalam sosialisasi serta pelatihan. Untuk mengatasi hambatan ini, beberapa upaya yang dapat dilakukan meliputi pelatihan yang lebih intensif dan

panduan yang jelas perlu disediakan sebelum memperkenalkan perubahan signifikan, mengimplementasikan strategi yang meminimalkan gangguan alur kerja saat perubahan dilakukan, termasuk perencanaan yang lebih baik terkait waktu peluncuran perubahan dan menyediakan dukungan tambahan selama masa transisi, dan memperkuat mekanisme umpan balik dengan survei atau diskusi langsung setelah perubahan diberlakukan sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Highsmith, Jim (2019). *Agile Software Development Ecosystem*, Addison-Wesley, 2002.
- MADCOMS. *PHP dan MYSQL untuk Pemula*. Yogyakarta. Mardianto,
- Lestari, N. S. R. I. (2018). *Implementasi Kebijakan E-Government Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya*. Perpustakaan.
- Moustakas, C. (1994). *Fenomonologi Research Methods* (V. Astrid (ed.); 1st ed.). Sage.
- Nurahma, R. A., Syaflan, M., & Suhartono, S. (2022). Evaluasi Penggunaan Aplikasi E-Kinerja Dan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dalam Meningkatkan Komitmen Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 239–254.
- Pangondian, R. A., Santosa, P. I., & Nugroho, E. (2019). Faktor Yang Harus Dipenuhi Oleh Sistem Informasi Pemerintahan (E-

- Government) Dalam Menghadapi Disrupsi Revolusi Industri 4.0. *Prosiding SEMNAS INOTEK (Seminar Nasional Inovasi Teknologi)*, 3(1), 17–22.
- Rahmadi, A. N., Jibril, M., & Muhammad, A. (2021). Implementasi E-Government Kota Probolinggo (Studi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Implementation of E-Government in Probolinggo (Study of Presidential Regulation Number 95 of 2018 Concerning Elect. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(3), 1–11.
- Rahmatul Putra, N., & Frinaldi, A. (2023). Penilaian Kinerja Pegawai Melalui Penerapan Sistem E-Kinerja Di Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 7(1), 12–24.
- Raihan, A. H., Amin, M. J., & Dama, M. (2017). Efektivitas Kebijakan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Si-Daleh) Di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 1205–1218.
- Setiyono, B. (2023). *Pemerintahan dan manajemen sektor publik*. Yogyakarta: Caps.
- Surdin, J. (2016). Analisis Kelayakan Implementasi E-Government Dalam Pelayanan Publik Di Bidang Keagrariaan Di Kabupaten Pinrang. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 5(1), 178–191.
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 13–23.
- Wiegers, Karl E. (2019). *First Things First: Prioritizing Requirements. Process Impact*. Diakses pada 17 Juli 2024.